Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i-ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
RingkasanEksekutif ..... vi-vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. GambaranUmumPemerintahKabupatenLuwu 2
Keadaan Penduduk 3
Keadaan Wilayah Administrasi 4
Potensi dan Keadaan Ekonomi 4
Sosial Budaya Pendidikan 7
C. StrukturOrganisasi 8
D. SistematikaPenyajian 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
A. RPJMD 2014-2019KabupatenLuwu 14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 20
Indikator Kinerja Utama (IKU) 23
Program dan Sasaran 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

A. CapaianKinerja.....31

B. Realisasi Anggaran 75

BAB IV PENUTUP 79

Daftar Tabel

TABEL 1.1	**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**	**1.5**
TABEL 1.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011 – 2015 (Persen)	1.6
TABEL 1.3	UrusanPemerintahan	1.10
TABEL 2.1	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama	2.17
TABEL 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	2.20
TABEL 2.3	Indikator Kinerja Utama	2.23
TABEL 2.4	Program Dan Sasaran	2.28
TABEL 3.1	Skala Pengukuran Ordinal	3.31

TABEL 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	3.31
TABEL 3.3	Target dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017	3.77

Daftar Gambar

• **GAMBAR 1.1**	**Peta Kabupaten Luwu**	I.1
• **GAMBAR 1.2**	**Luas Areal Perkecamatan di Kab.Luwu 2018**	I.3
• **GAMBAR 1.3**	**Sarana dan Prasarana Pendidikan**	I.3
• **GAMBAR 1.4**	**FasilitasKesehatan**	I.4

RingkasanEksekutif

DalampenyelenggaraanpemerintahandaerahPemerintahKabupatenLuwuberupayamenyelenggarakanpemerintahandenganberprinsippada pemerintahan yangbaik (goodgovernance)dan berorientasikepadahasil(result orientedgovernment)sesuaidengankewenangannya.Olehkarenaitu,manajemenpemerintahanyangperludiimplementasikanadalahakuntabilitaskinerja.Akuntabilitaskinerjasetidaknyaharus memuatvisi,misi,tujuandan sasaran yangmemilikiarahdan tolokukuryangjelasatasrumusanperencanaanstrategisorganisasisehinggagambaranhasil yang ingindicapaidalambentuksasarandapatterukur,dapatdiujikandiandalkan.Tahun2018merupakantahunkeempatdalamupayapencapaiantujuandan sasaranRPJMD 2014-2019,secaraumumpencapaiansasaranmelaluiindikator-indikatorsasaranmenunjukkankeberhasilanuntukmencapaimisidan tujuansebagaimanayangtertuangdalamPeraturanDaerahKabupatenLuwuNomor8Tahun2014tentangRPJMDKabupatenLuwuTahun2014-2019 dimana LaporanKinerjaKabupatenLuwutahun2018inimerupakanamanatPeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah,PeraturanPresidenNomor29Tahun2014tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah,danInstruksiPresidenNomor5Tahun2004tentangPercepatanPemberantasanKorupsi.PenyusunanLaporanKinerjadilakukandenganmendasarkanpadaPeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor53Tahun2014tentangPetunjukTeknisPenyusunanPerjanjianKinerja,PelaporanKinerjadanReviuatasLaporanKinerja,dimanapelaporancapaiankinerjaorganisasisecaratransparandanakuntabelmerupakanbentukpertanggungjawabanataskinerjaKabupatenLuwu.

LaporanKinerjainidisusundenganmelakukananalisa,sejauhmanasasaranpembangunanyangditunjukkan

dengankeberhasilanpencapaianIndikatorKinerjaUtama(IKU)KabupatenLuwuyangtelah ditetapkantahun2017 didalam RPJMD 2014-2019.Berdasarkanhasilpengukurankinerjaterhadap30indikatorkinerjautama,disimpulkandiket

ahui bahwa 6 indikator sasaran atau 153,73% **Sangat Baik**, 7 indikator sasaran atau 94,62% **Baik**.Beberapaindikatorkinerjayangcapaiannyabelumsepertiyangdiharapkanperlu mendapatkan perhatianpadatahunberikutnya.

Untuk8(Delapan)IKUyangpencapaiannyamasukkriteria**SangatBaik**,dan 21 (DuaPuluh Satu)IKUyangpencapaiannyamasukkriteria**Baik**,yaituindikatoryangpencapaiannyalebih dari 75% - 100%.SebagaibagiandariperbaikankinerjapemerintahdaerahyangmenjaditujuandaripenyusunanLaporanKinerja,hasilevaluasicapaiankinerjainijugapentingdipergunakanolehSKPDdilingkunganKabupatenLuwuuntukperbaikanperencanaandanpelaksanaanprogram/kegiatanditahunyangakandatang,utamanyadalamrangkamemberikanpeningkatanpelayanandanpeningkatankesejahteraanrakyat.

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb



Denganmengucapsyukurkepada Allah SubhanahuWata'ala,Tuhan Yang MahaEsa, sayamenyambutgembiradenganterbitnyaLaporanKinerjaPemerintah(LKj) PemerintahKabupatenLuwuTahun 2019yang merupakandokumenresmiPemerintahKabupatenLuwudalampertanggungjawabanpelaksanaanKinerjaselamatahun 2018.

TugasutamaEksekutifPemerintahKabupatenLuwuadalahmelaksanakanpembangunan dan pemerintahandaerahsesuaidengantugaspokok, fungsidan tanggungjawabkitamasing-

masingsecaraprofesional, bertanggungjawab dan terkoordinasi. SebagaipertanggungjawabanataskinerjaPemerintahKabupatenLuwuselamatahun 2018, makadisusunlahLaporanKinerjaPemerintah(LKj) PemerintahKabupatenLuwuTahun 2018sebagaimanaditegaskandalamPeraturanMenteri PendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiR I Nomor53 Tahun 2014. Hal iniuntukmenunjukkankepadamasyarakatbahwa PemerintahKabupatenLuwumempunyaikomitmen dan tekad yang kuatuntukmelaksanakankinerjaorganisasiyang berorientasipada hasil, baikberupa*output* maupun*outcomes*. Disisiyang lain, penyusunanLKjPemerintahKabupatenLuwujuga dimaksudkansebagaipengejawantahanprinsiptransparansidan akuntabilitas yang merupakanpilarpentingpelaksanaan*good governance*.

Semogapenyajian LKjPemerintahKabupatenLuwuTahun 2019inimenjadicerminbagikitasemuauntukmengevaluasikinerjaorganisasiselamasatutahun agar dapatmelaksanakankinerjakedepansecaralebihproduktif, efektifdan efisien, baikdariaspekperencanaan, pengorganisasian, manajemenkeuanganmaupunkoordinasipelaksanannya.

Akhirnya, sayaselakuBupatiLuwumengajakkepadaseluruhaparaturPemerintahKabupatenLuwuuntuksecarabersama-sama, bersungguh- sungguh, ikhlas, sertapenuhsemangatdenganprinsip "Hari inilebihbaikdariharikemarin dan hariesoklebihcerahdarihariini", untukdapatmelaksanakankinerjalebihbaiklagidi tahunmendatang.

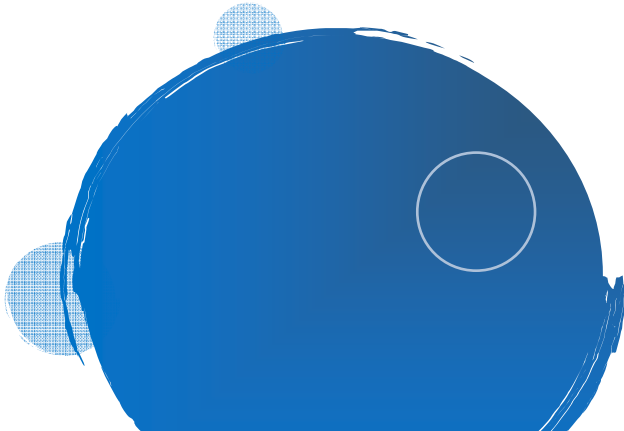
Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Belopa, Februari2019

BUPATILUWU

H.A.MUDZAKKAR





BAB. 1

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Jl. Jend. Sudirman No.1 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)

0471 (3314019)

Bappedaluwu01@gmail.com

Bappeda.Luwukab.go.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai Perwujudan kewajiban instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorongterwujudnyaGoodGovernanceataudalamperspektifyang lebihluasberfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

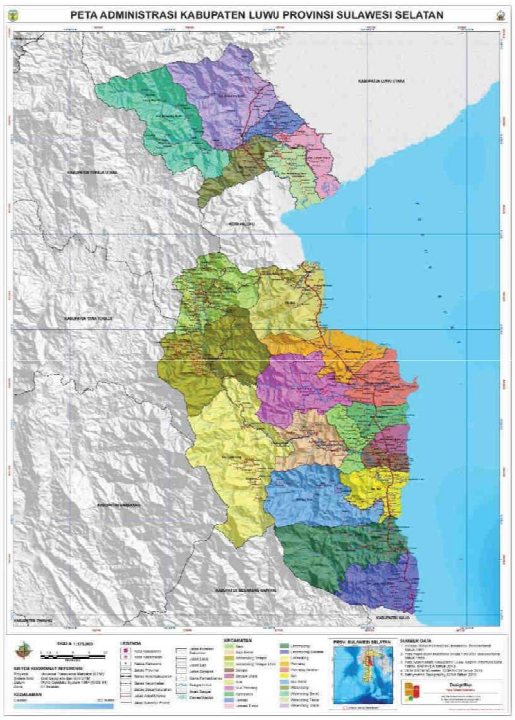
B. Gambaran Umum

Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota

Gambar 1.1

Peta Kab.Luwu



Kabupaten adalah Kota Belopayang wilayahnya terletak antara 2°34'45" – 3°30'30" Lintang Selatan dan 120 °21'15" - 121 °43'11" Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Luwu sebelumnya adalah kota Palopo namun dengan dikeluarkannya Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu, maka ibukota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sebagai pusat pemerintahan, akibat hal tersebut maka wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh wilayah Kota Palopo yang terletak di tengah – tengah wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah perbatasan Kabupaten Luwu berbatasan dengan:

- Di sebelah Utara Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo;
- Di sebelah Timur Teluk Bone; Di sebelah Selatan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo; dan
- Di sebelah Barat Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang.

Luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km^2. Menurut ketinggian daerah, sebagaian besar wilayah Kabupaten Luwu berada di ketinggian 100 m keatas atau sekitar 64 persen. sisanya sekitar 36 persen wilayah berada pada ketinggian 0 – 100 m.

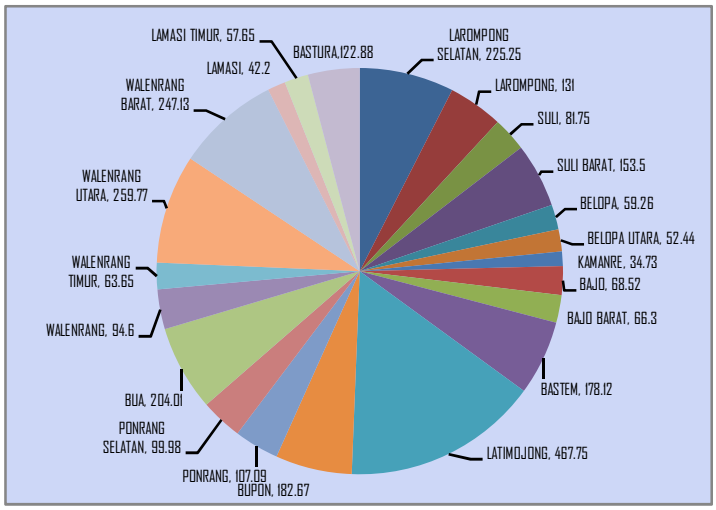
Luas Kabupaten Luwu menurut jenisnya terdiri dari lahan sawah dan lahan kering dimana masing – masing seluas 37.267 ha untuk lahan sawah 262.758 ha lahan kering.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi pertanian di Kabupaten Luwu dari sisi penggunaan lahan cukup menggembirakan karena sebesar 47,25 % atau hampir setengah luas wilayah dijadikan lahan pertanian.

KeadaanPenduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2018 adalah sebesar 350.218 jiwa yang terdiri dari 172.092 jiwa laki – laki dan 178.126 jiwa perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 – 2018 sebesar 0,90 persen. Jumlah rumah tangga keadaan akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 76.114 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 – 5 orang.Jumlah rumah tangga ini terbanyak di Kecamatan Bua sekitar 7.111 rumah tangga dan terkecil di Kecamatan Latimojong dengan jumlah rumah tangga hanya tercatat 1.588 rumah tangga.Jumlah penduduk Kabupaten Luwu yang terus bertambah setiap Tahunnya tersebar di berbagai kecamatan dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,83% darijumlah penduduk Kabupaten Luwu, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,58% . Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km², Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 489,74 penduduk per kilometer persegi dengan luas wilayah hanya 1,41 persen dari luas Kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah kepadatannya terdapat di Kecamatan Latimojong yaitu hanya 11,86 penduduk per kilometer persegi dengan luas wilayah 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu.

Wilayah Administrasi

Gambar 1.2
Luas Areal Perkecamatan di Kab.Luwu 2018



Dengan luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km² terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2018 yang dibagi habis menjadi 227 desa/ kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kecamatan Luwu dengan luas 467,75 km² atau sekitar 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Walenrang Utara dengan luas 259,77

km²(8,66%). Sedangkankecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen dari luas Kabupaten Luwu.

PotensiKeadaanEkonomi

Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan proses jangka panjang dari suatu pemerintahan dengan sasaran utama proses tersebut adalah bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan.Meskipun Kabupaten Luwu yang sekarang adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo namun potensi perekonomiannya masih cukup tinggi. Hal ini nampak antara lain dari nilai PDRB , dimana PertumbuhanekonomiKabupatenLuwuberdasarkanPDRBatasdasar hargakonstanadalah sebesar7,26persen,yaitudariangka PDRBsebesar6.934.342,18(jutarupiah)padatahun2015menjadi7.347.789,83 (juta rupiah)pada tahun 2018.Sedangkan pertumbuhan riil setiap sektor kegiatan ekonomi dapat dilihat pada seberapa besar konstribusi masing – masing sektor terhadap pembentukan PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya,sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini

Tabel.1.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu
atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	% Kontribusi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.756.432,63	4.264.683,6	53,38
B	Pertambangan dan Penggalian	168.828,18	200.405,63	2.77
C	Industri Pengolahan	330.204,24	387.109,02	4.15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.930,56	10.665,96	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.180,97	1.409,30	0.01
F	Konstruksi	646.042,60	710,449.84	8.14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	864.502,94	181,145,92	9.87
H	Transportasi dan Pergudangan	59.148,67	65.729,95	0.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.009,32	61.503,23	0.67
J	Informasi dan Komunikasi	218.104,06	254.048,77	2.10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	104.311,97	126.827,09	1.44

L	Real Estate	452.540,63	517.080,06	5.92
M, N	Jasa Perusahaan	1.787,12	2.190,99	0.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	345.252,67	389.601,42	4.53
P	Jasa Pendidikan	255.285,20	302,253.45	3.34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.445,83	240.345,76	2.49
R, S, T, U	Jasa Lainnya	20.530,70	24.620,06	0.29
	PDRB	**7.437.789,83**	**8.567.872,0**	**100.00**

Untuk memperoleh gambaran struktur ekonomi Kabupaten Luwu dapat dilihat dari hasil angka distribusi persentase PDRB berdasarkan lapangan usaha, dimana semakin besar persentase pembentukan PDRB suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian.

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan PDRB atas harga konstan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,64	50,04	50,57	53,29	53,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	2,26	2,42	2,66	2,77
C	IndustriPengolahan	4,96	4,62	4,35	4,23	4,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, PengelolaanSampah, LimbahdanDaurUlang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
F	Konstruksi	9,86	9,66	9,30	8,65	8,14
G	PerdaganganBesar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,28	11,46	11,14	10,28	9,87
H	Transportasi dan Pergudangan	0,79	0,76	0,75	0,78	0,80
I	PenyediaanAkomodasi dan MakanMinum	0,82	0,82	0,78	0,71	0,67
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	2,23	2,49	2,26	2,10
K	JasaKeuangan dan Asuransi	1,26	1,34	1,44	1,38	1,44
L	Real Estate	5,78	6,15	6,25	5,98	5,92
M, N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03

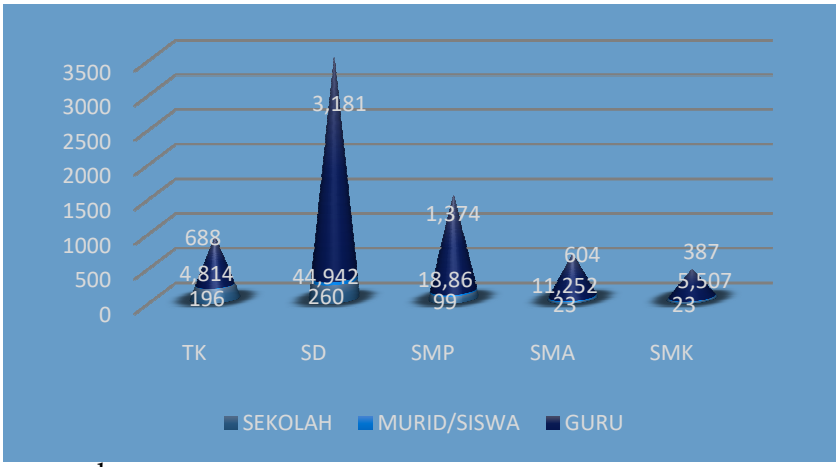
O	AdministrasiPemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosialWajib	5,58	5,24	4,89	4,57	4,53
P	Jasa Pendidikan	3,06	3,43	3,55	3,17	3,34
Q	JasaKesehatan dan KegiatanSosial	1,37	1,56	1,66	1,64	2,49
R, S, T,	JasaLainnya	0,27	0,28	0,29	0,27	0,29
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

SOSIAL BUDAYA

(Pendidikan)

Pada tahun 2018 jumlah sekolah Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Luwu sebanyak 196 sekolah dengan jumlah murid mencapai 4.814 orang

Gambar 1.3
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN



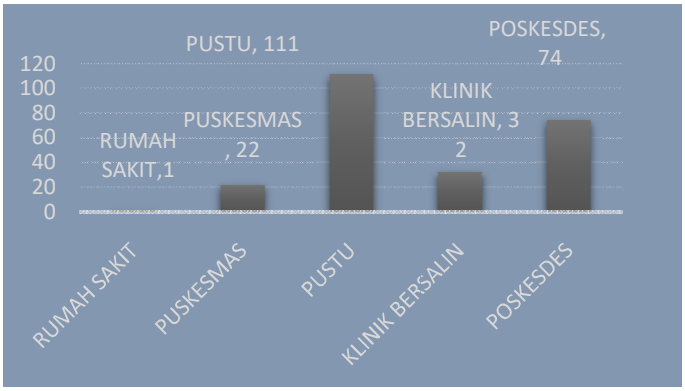
dengan tenaga pengajar sebanyak 688 orang, Sekolah Dasar sebanyak 260 sekolah dengan jumlah murid sekolah dasar sebanyak 44.942 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 3.181 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 99 sekolah dengan murid mencapai 18.860 orang dan

tenaga pengajar sebanyak 1.374 orang, Sekolah Menengah Umum sebanyak 23 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 11.252 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 604 orang, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 23 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 5.507 orang dan guru sebanyak 387 orang.

(Kesehatan)

Gambar 1.4

FASILITASKESEHATAN



Sampai dengan Tahun 2018 di Kabupaten Luwu tercatat fasilitas kesehatan yang tersedia adalah 1 rumah sakit, 22 puskesmas, 111 puskesmas pembantu, 32 Klinik Bersalin Desa, 74 Pos Kesehatan Desa. Disamping sarana kesehatan, sumber daya manusia dibidang kesehatan juga menentukan keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan pada Tahun 2018 terdiri dari Dokter Umum 24 orang, Dokter gigi 12 orang, Apoteker 12 orang, Bidan 228 orang.

(Agama)

Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama yang terdiri dari mesjid, mushalla, gereja, dan sarana peribadatan umat hindu dan budha. Walaupun sebagian besar penduduk Kabupaten Luwu beragama Islam namun sarana peribadatan agama lain tetap ada. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan. Jumlah tempat agama di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 adalah mesjid 752 buah, mushallah 80 buah dan gereja 195 buah.

C.StrukturOrganisasi

BerdasarkanUndang - UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah, telahdilakukanpenataankembaliOrganisasiPerangkat Daerah berdasarkanPeraturan Daerah KabupatenLuwuNomor6Tahun 2017tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah KabupatenLuwu.

SusunanPerangkat Daerah berdasarkanPeraturan Daerah KabupatenLuwuNomor6Tahun

2017sebagaiberikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perumahan dan Permukiman
7. Dinas Sosial
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10. Dinas PUPR
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Pariwisata
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan Persandian
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Dinas Pertanian
22. Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Dinas Pertanahan
24. Dinas Perdagangan
25. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
26. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

27. Dinas PMPTSP
28. Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian
29. Dinas Satpol PP
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
31. Badan Pengelola Keuangan Daerah
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
34. Badan Pendapatan Daerah
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36. Inspektorat
37. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa
38. Kecamatan

Tabel 1.3
UrusanPemerintahan
BerdasarkanUndang – UndangNomor 23 Tahun 2014
Yang MenjadiKewenangan Daerah

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	**Pendidikan**	**Pendidikan Dasar, PAUD danNon Formal**
2	Kesehatan	-
3	PekerjaanUmum dan PenataanRuang;	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-
5	Ketentraman dan KetertibanUmumserta Perlindungan Masyarakat	-

6	Sosial	-
NO.	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Tenaga Kerja	-
2	PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan	-
	Anak	
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	LingkunganHidup	-
6	AdministrasiKependudukan dan Pencatatan	-
	Sipil	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		-
8	PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	
		-
9	Perhubungan	
		-
10	Komunikasi dan Informatika	-
11	Koperasi, usahakecil, dan menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12	Penanaman Modal	-
13	Kepemudahaan dan Olah Raga	-
14	Statistik	-
15	Persandian	-
16	Kebudayaan	-

17	Perpustakaan	-
18	Kearsipan	-
NO.	URUSAN PILIHAN	KETERANGAN
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten
6	Energi dan SumberDayaMeneral	Penerbitanizinpemanfaatanlangsung panasbumidalamdaerahKabupaten
7	Perindustrian	-
8	Transmigrasi	-

D.SistematikaLKjIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2016. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkandiidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*)bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2016sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**
  - Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**
  - Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

  A. Capaian Kinerja
  - Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

  B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
  - Pada sub bab ini disajikan Evaluasi dan analisis dari kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis serta indikator sasaran

  C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu
  - Pada sub bab ini disajikan realisasi Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan
- **Bab IV Penutup**

- Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB.2

PERENCANAAN &PERJANJIAN KINERJA

A.RPJMD 2014-2019

VisiMisi

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Menengah Daerah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Luwu dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Bupati H.A.MUDZAKKAR dan wakil Bupati H.AMRU SAHER membuat Visi Kabupaten Luwu tahun 2014-2019 sebagai berikut:

" TERWUJUDNYA KABUPATEN LUWU

Jl.Jend.Sudirman No.1 (KompleksPerkantoran Pemkab.Luwu)

0471 (3314019)

Bappedaluwu01@gmail.com

Bappeda.Luwukab.go.id

YANG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING YANG BERNUANSA RELIGIUS ”

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

1) Lebih maju artinya : Mengarah pada kondisi yang mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
2) Lebih Mandiri artinya : Merupakan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada daerah lain sejak berdirinya kabupaten sudah terbiasa sehingga bebas dari ketergantungan pada daerah lain.
3) Lebih Berdaya saing artinya : Merupakan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan regional serta nasional.

DanBernuansa Religius merupakan wadah dari ketiga pokok visi diatas.

Visi Kabupaten Luwu tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Luwu yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025,yaitu :**“ LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI ”**.

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3) Membangun Desa dan Menata Kota;
4) Peningkatan kualitas Infrastruktur dan tata ruang wilayah;
5) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah;
6) Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7) Meningkatkan Keamanan dan ketertiban masyarakat;

TujuanSasaran

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019, dalam setiap misi pembangunannya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur,

Tujuan:

1. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang professional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif.

Sasaran:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik
3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan,

Tujuan:

1. Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Misi Ketiga : Membangunan Desa dan Menata Kota,

Tujuan:

1. Meningkatkan aksesbilitas terhadap infrastruktur dasa

Sasaran:

1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan serta sarana dan prasarana perkotaan

Misi Keempat : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah,

Tujuan:

1. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

Sasaran:

1. Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas

Misi Kelima : Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Tujuan:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Sasaran:

1. Meningkatnya daya saing usaha pertanian.

2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
4. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan

Misi Keenam : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan:

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan

Sasaran:

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.

Misi Ke-tujuh : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,

Tujuan:

1. Meningkatkan stabilitas di daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum

Tabel 2.1

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas**	1. Predikat Opini BPK Terhadap LaporanKeuangan Pemerintah Daerah 2. PersentaseCapaian rata-rata kumulatifatassasarankerjapegawai dan prilakukerjapegawai ASN
2.	**Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik**	3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 4. RasioPendudukber KTP persatuanPenduduk
3.	**Meningkatnya Profesionalisme dan**	5. Predikat AKIP 6. Persentase

	Kualitas Kesejahteraan Aparatur	TingkatPengembangKompetensi SDM Aparatur
4.	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan**	7. PersentaseRuang Kelas dalamkondisibaik (SD/Paket A) 8. Angka rata-rata lama sekolah(SD) 9. AngkaPartisipasiKasar (APK) 10. AngkaPartisipasiMurni(APM) - SD/Paket A - SMP/Paket B
5.	**Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau**	11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 12. PersentaseBalitaGiziburuk yang tertangani
6.	**Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan**	13. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 14. Jumlah Pembangunan Jembatan 15. PersentaseJaringanIrigasi yang berfungsi 16. Persentase Traffic Light yang berfungsibaik
7.	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas**	17. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 18. Persentase RT bersanitasi 19. Persentasesampah yang

		tertanganisampai pada TPA
8.	**Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian**	20. JumlahProduktivitas padi per hektar 21. KontribusisektorPertanian/ Perkebunan terhadap PDRB
9.	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri**	22. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 23. Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha
10.	**Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan**	24. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 25. PersentaseKoperasiAktif
11.	**Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan**	26. ProduksiPerikanan (Tangkap + Budidaya) 27. Cakupanbinakelompoknelayan
12.	**Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana**	28. PersentaseKetaatanterhadap RTRW
13.	**Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum**	29. PersentaseKepatuhan terhadap Perda 30. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

B.PerjanjianKinerja 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalahpenugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja,yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukurkinerja sebagai dasarevaluasikinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaranorganisasidan sebagai dasarpemberian penghargaandan sanksi;
4. Sebagaidasarbagipemberiamanahuntukmelakukanmonitoring,evaluasi dan superviseatasperkembangan/kemajuankinerjapenerima amanah.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja. Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan PK Tahun 2016 sebagai berikut

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas**	Predikat Opini BPK Terhadap LaporanKeuangan Pemerintah Daerah	Opini/Nilai	WTP/75
		PersentaseCapaian rata-rata kumulatifatassasarankerjapegawai dan prilakukerjapegawai ASN	%	90
2	**Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik**	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100
		RasioPendudukber KTP persatuanPenduduk	%	97,82
3	**Meningkatnya Profesionalisme dan**	Predikat AKIP	Predikat/ Nilai	B/60-70

	Kualitas Kesejahteraan Aparatur	Persentase TingkatPengembanganKompetensi SDM Aparatur	%	65
4		PersentaseRuang Kelas dalamkondisibaik (SD/Paket A)	%	80
		Angka rata-rata lama sekolah(SD)	Tahun	8,05
		AngkaPartisipasiKasar (APK)	%	100
		AngkaPartisipasiMurni(APM) - SD/Paket A - SMP/Paket B	%	 98,50 91,30
5	**Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau**	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75
		PersentaseBalitaGiziburuk yang tertangani	%	100
6	**Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan**	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	27,75
		Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	30
		PersentaseJaringanIrigasi yang berfungsi	%	12
		Persentase Traffic Light yang berfungsibaik	%	100
7	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas**	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	82
		Persentase RT bersanitasi	%	86

		Persentasesampah yang tertanganisampai pada TPA	%	80
8	**Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian**	JumlahProduktivitaspadi per hektar	Ton/ hektar	7,53
		KontribusisektorPertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	51,70
9	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri**	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	12
		Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	9
10	**Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan**	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	34.217
		PersentaseKoperasiAktif	%	9,09
	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan	ProduksiPerikanan (Tangkap+Budidaya)	Ton	695.698
		Cakupanbinakelompoknelayan	Klmpk	26
	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana	PersentaseKetaatanterhadap RTRW	%	94
13	**Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum**	PersentaseKepatuhanterhadap Perda	%	100
		Cakupan patroli petugas satpol PP	kali	70

IndikatorKinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebutmaka Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (sesuai indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD 2014-2019) untuk tingkat Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk tahun ke dua, ke tiga dan tahun akhir RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/ KEG.	OPD TERKAIT
1.	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas**	1. Predikat Opini BPK Terhadap LaporanKeuangan Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi/opini BPK	Program Peningkatan dan PengembangannPengelolaan Keuangan Daerah	BPKD BKPSDM
		2. PersentaseCapaian rata-rata kumulatifatassasarankerjapegawai dan prilakukerjapegawai ASN	Jumlah pegawai dengan capaian SKP yang bernilai "Baik" di lingkunganPemkab. LuwuterhadapJumlah Pegawai ASN diLingkunganPemkab.Luwu x 100%	Program Pembinaan dan PengembangnAparatur	
2.	**Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik**	3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Hasil Survey IKM		DPM-TPSP
		4. RasioPendudukber KTP persatuanPenduduk	JumlahPenduduk Yang Berumur +17 Tahun Yang Ber KTP terhadapjumlahpendudukusia +17 tahun x 100%	Program PenataanAdministrasikependudukan	DUKCAPIL
3.	**Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur**	5. Predikat AKIP	Nilai/hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Men PAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG
		6. Persentasetingkatpe	Jumlah pegawai yangmengikuti		BKPSDM

		ngembangankompetensi SDM aparatur	pengembangankompetensi SDM aparatursesuai analisis kebutuhan Pengembanganterhadap Jumlah pegawai dilingkungan Pemkab.Luwu x 100 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
4.	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan**	7. PersentaseRuang Kelas dalamkondisibaik (SD) 8. Angka rata-rata lama sekolah 9. AngkapartisipasiKasar (APK) 10. AngkaPartisipasi Murni(APM)	JumlahRuangkelaskondisibaikperiodetertentuterhadapjumlah ruangkelasseluruhnyaperiodetertentu di Kab.Luwu x 100% Jumlahtahunbersekolahindividudiatas6tahunterhadapjumlah penduduk diatas6 tahun Jumlah siswa tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentux100% Jumlahanak pada kelompokusiasekolahtertentu yang sedangbersekolah pada jenjangpendidikan yang sesuaidenganusianyaterhadapjumlahseluruhanak pada kelompokusiasekolah yang bersangkutan x 100%	Program Wajibbelajarpendidikandasar 9 tahun	DINAS PENDIDIKAN
5.	**Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau**	11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 12. PersentaseBalitaGiziburuk yang	Jumlah umur penduduk yang meninggal periode tertentuterhadapjumlah penduduk yang meninggal periode tertentu x 100% JumlahBalitaGiziBuruk yang tertaganiperiodeter	Program PromosiKesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program PerbaikanGizi	DINAS KESEHATAN

		tertangani	tentuTerhadapjumlahBalita yang lahirperiodetertentu x 100%	Masyarakat	
6.	**Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan**	13. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 14. Jumlah Pembangunan Jembatan 15. PersentaseJaringanIrigasi yang berfungsi 16. Persentase Traffic Light yang berfungsibaik	Panjang jalan kondisi baik terhadap panjang jalan Kab.Luwu x 100% JumlahJembatan yang dibangunPeriodetertentu di Kab.Luwu JumlahJaringanIrigasikondisibaikterhadapjumlahjaringanirigasi di Kab.Luwu x 100% Jumlah Traffic Light yang berfungsibaikterhadapjumlah traffic light diKab.Luwu	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan PengelolaanjaringanIrigasi,, rawa dan jaringanPengairanlainnya Program peningkatan dan pengawasanlalulintas	DINAS PUPR DINAS PERHUBUNGAN
7.	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas**	17. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 18. Persentase RT bersanitasi 19. Persentasesampah yangtertanganisampai pada TPA	Jumlah RT pengguna air bersih terhadap jumlah RT periodetertentudi Kab.luwu x 100% Jumlah RT yang bersanitasiterhadapjumlah RT di Kab.Luwu x 100% Volume sampah yang tertangani sampai TPA terhadap kapasitas TPA x 100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program PengembangannKinerjaPengelolaanPersampahan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian**	20. JumlahProduktivitaspadi per hektar 21. KontribusisektorPertanian/	Produksi padi periode tertentu di Kab.Luwu JumlahKontribusiSektorPertanian/Perkebunan Terhadap	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) Program Peningkatan	DINAS PERTANIAN

			Perkebunan terhadap PDRB	PDRB periodetertentu di Kab.Luwux 100%	Produksi Pertanian/Perkebunan	
9.	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri**	22. 23.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah Investor di Kab.luwu Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	DINAS PMPTSP
10.	**Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan**	24. 25.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil PersentaseKoperasiAktif	Jumlah usaha mikro dan kecil periodetertentudi Kab.Luwu Jumlah koperasi yang aktifperiodetertentu terhadap jumlah koperasi di Kab.Luwu periodetertentux 100%	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatankualitaskelembagaankoperasi	DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN
11.	**Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan**	26. 27.	ProduksiPerikanan (Tangkap + Budidaya) Cakupanbinakelompoknelayan	JumlahProduksiPerikananperiodetertentu di Kab.Luwu Jumlah Bina kelompoknelayanperiodetertentu di Kab.Luwu	Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	DINAS PERIKANAN

12.	**Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana**	28. PersentaseKetaatanterhadap RTRW	Persentasekesesuaian Lahansesuai RTRW terhadapluas wilayah Kab.Luwu x100%	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	**Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum**	29. PersentaseKepatuhanterhadap Perda 30. Cakupan patroli petugas satpol PP	JumlahPenegakan PERDA periodetertentuterhadapJumlah PERDA seluruhnyaperiodetertentu di Kab.Luwu x100 Jumlah patroli petugas satpol PP periode tertentu di Kab.Luwu	Program PenataanPeraturanPerundang-undanganden gan2kegiatan Program Satuan Tugas (Satgas) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	DINAS SATPOL PP

Program Sasaran

Berdasarkanvisi,misi,tujuan,sasaranstrategisdanarahkebijakanyangtelahditetapkandalamRPJMD,makaupayapencapaiannyakemudiandijabarkansecaralebihsistematismelaluiperumusanprogram-programprioritasdaerah.Adapunprogram-programyangmendukungmasing-masingsasarantahun2018sebagaiberikut:

Tabel 2.4
PROGRAM DAN SASARAN

No	Sasaran Strategis	di dukung Jumlah Program dan Kegiatan
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas	2 Program dan 2 Kegiatan
2.	Meningkatnya Kualitas	1 Program dan 1 Kegiatan

	dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	
3.	Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur	2 Program dan 2 Kegiatan
4.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Program dan 30 Kegiatan
5.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau	2 Program dan 11 Kegiatan
6.	Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan	4 Program dan 24 Kegiatan
7.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas	2 Program dan 6 Kegiatan
8.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian	2 Program dan 7 Kegiatan
9.	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri	2 Program dan 6 Kegiatan
10.	Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan	3 Program dan 7 Kegiatan
11.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan	2 Program dan 11 Kegiatan
12.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana	2 Program dan 5 Kegiatan
13.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran	2 Program dan 3 Kegiatan

Politik dan Hukum

BAB.3 AKUNTABILITAS KINERJA

.Pemerintah Kabupaten Luwu selaku pengemban amanah masyarakat Luwu melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2014-2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian

sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel.3.1

Skala Pengukuran Ordinal

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A.Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2018

Indikator Kinerja Sasaran yang akan dikinerjakan adalah indikator masing-masing sasaranuntuk setiap Misi yang ada dalam dokumen RPJMD. Indikator sasaran tersebut berupa outcome dan Output penting merupakan indikator kinerja utama perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran. Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2018 secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Predikat Opini BPK Terhadap LaporanKeuangan	Opini/	WTP/100	WTP/100	WTP/100

	Pemerintah Daerah	Nilai			
2.	Persentase Capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN	%	90	85	94,44
3.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100	100	100
4.	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	97,82	100	102,2
5.	Predikat AKIP	Predikat /Nilai	B/60-70	CC/51,06	72,94
6.	Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	65	60	92,30
7.	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	%	80	60	75
8.	Angka rata-rata lama sekolah(SD)	Tahun	8,05	7	86,95
9.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100	99,50	99,50
10.	Angka Partisipasi Murni(APM) - SD/Paket A - SMP/Paket B	%	 98,50 91,30	 97,51 83,07	 98,99 90,98
11.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75	72	96,00
12.	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	%	100	100	100
13.	Persentase Panjang Jalan	%	27,75	27,13	97,76

	dalam Kondisi Baik				
14.	Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	30	30	100
15.	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	%	12	36,33	302,75
16.	Persentase Traffic Light yang berfungsi baik	%	100	100	100
17.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	82	81,53	99,42
18.	Persentase RT bersanitasi	%	86	85	98,83
19.	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	%	80	85,84	107,30
20.	Jumlah Produktivitas padi per hektar	Ton/ hektar	7,53	7,89	104,7
21.	Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	51,70	54,64	105,68
22.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	12	10	83,33
23.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	9	9	100
24.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	34.217	32.112	93,84
25.	Persentase Koperasi Aktif	%	9,09	8,99	98,89
26.	Produksi Perikanan (Tangkap+Budidaya)	Ton	695.698	698.186	100,35
27.	Cakupan bina kelompok nelayan	Klmpk	26	50	192,3
28.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	94	84,8	90,21
29.	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	%	100	100	100
30.	Cakupan patroli petugas satpol PP	kali	70	70	100

Pencapaian masing–masing sasaran dapat uraikan sebagai berikut:

Capaian Kinerja MISI 1

Meningkatkan Profesionalisme Aparatur

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Sasaran yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas.

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas	Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini/ Nilai	WTP	WTP	100
	Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	%	90	85	94,44
Rata – rata capaian kinerja					97,22

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang mencapai terget kinerjadan satu indikator yang tidak mencapai target kinerja. sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 97,22 persen. Namun begitu kategori capaiannya **Baik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 75 % sd.100%.**

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja (%)		
		2016	2017	2018
1.	Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100
2.	Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	88,75	93,75	97,22

Menyimak capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas ini mampu mempertahankan predikat WTP nya selama beberapa tahun.Indikator Predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerahmerupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dimana tiga tahun berturut turut yakni tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 meraih predikat WTP.Selama beberapa tahun tersebut Kabupaten Luwu mampu mengeksiskan kinerjanya untuk tetap bertahan di predikat WTP. Begitupun halnya dengan indikator ke 2 yakni indikator Persentase capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN.indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun berturut-turut yakni sebesar 88,75 % pada tahun 2016 kemudian sebesar 93,75% pada tahun 2017 dan sebesar 97,22% pada tahun 2018 .

c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100
2.	Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	%	78,33%	90%	87,03

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 1 indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan 2) Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN.



Indikator Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerahuntuk tahun 2017 dan 2018 mampu diraih dengan opini WTP sesuai target WTP. Dimana Acuan untuk pemberian opini WTP selain kepatuhan terhadap per undang undangan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian SAP dan Internal Control. Namun juga disebabkan karena:

1. Adanya kepercayaan publik, transparansi, dan regulasi yang sehat dimana untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi ,efisiensi dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah;
2. Pemerintah mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan; dan
3. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secaralangsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Untuk mempertahankan indikator tersebut diatas maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah Peningkatan komitmen dari setiap unsur pelaksana bahwa upaya perbaikan pengelolaan keuangan tidak hanya dengan semangat tapi juga dengan dukungan dana yang besar, sumber daya manusia yang profesional dan yang paling penting adalah itikad untuk melaksanakan perbaikan.



Indikator Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASNmengalami peningkatan sebesar 3,47% di tahun 2018 dari tahun 2017, Sekalipun belum mampu mencapai target di tahun ke 4 pelaksanaan RPJMDHal ini disebabkan karena :

1. Sesuai kenyataan empirin yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bahwa proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas saja,skalipun metode penilaian kinerja yang ada saat ini telah berorientasi pada hasil kinerja/prestasi kerja.
2. Kurangnya Pengetahuan tentang sistem penilaian SKP, mengingat metode ini baru dilaksanakan sehingga sistem penilaian baru ini membuat PNS kelabakan. Tetapi, sistem ini jauh lebih obyektif, terutama karena sifat transparansi dalam penilaian. Seperti halnya setiap peraturan, selalu ada plus minusnya. Sehingga Untuk meningkatkan indikator tersebut diatas, makaSasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan karier atau promosi dari seorang PNS, selain itu juga untuk menentukan training, standar penggajian, mutasi atau perpindahan pegawai, peningkatan produktivitas dan tanggung jawab karyawan, peningkatan motivasi pegawai, menghindari pilih kasih dan terlebih lagi sangat bermanfaat dalam hal pengukuran keberhasilan kepemimpinan sesorang Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu sangat diharapkan dukungan dari semua personel Pegawai Negeri Sipil untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai ini karena di dalamnya memuat semua kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai, serta kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas ini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 2(dua) kegiatan, yaitu: **Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan 1 kegiatan, dan **Program pembinaan dan pengembangan aparatur** dengan 1 kegiatan.

Sasaran 2 : **Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik.**

Analisis pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan	%	100	100	100

dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	Layanan Masyarakat				
	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	97,82	100	102,2
Rata – rata capaian kinerja					101,1

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat dua indikator yang terealisasi mencapai dan melampaui target kinerja. sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 101,1 persen, dan kategori capaiannya **Baik Sekali** karena berada pada rentang capaian**lebih dari 100%.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	74%	-%	100
2.	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	95	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik ini mengalami peningkatan. **Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**pada tahun 2017 tidak terealisasi oleh karena pada tahun tersebut tahun 2017 survey tidak di lakukan oleh karena tidak tertuang dalam program/kegiatan. untuk **Indikator Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk**, 95 persen pada tahun 2016 meningkatmenjadi 100 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Layanan	%	58	100	58

	Masyarakat				
2.	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	98,33	97,82	100,52

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat; 2) Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk.

Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakattidak terealisasi dari target yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa untuk indikator ini tidak dapat diukur apakah telah terjadi peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena indikator ini oleh pemerintah tidak difokuskan setiap tahunnya dalam pengalokasian anggaran. Untuk merealisasikan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah komitmen pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan mengedepankan pelayanan publik khususnya perangkat daerah yang berorientasi pada pelayanan.

Indikator Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk terealisasi dengan persentase sebesar 102,2 persen dari target 97,82 persen. hal ini disebabkan karena animo kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sangatlah luar biasa, mengingat Kartu tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi pendudukyang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (WNI) dan wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)yang sudah wajib untuk memiliki, yang keberadaannya sangat bermanfaat sebagai :

1. KTP merupakan dokumen kependudukan utama yang menjadi bukti resmi identitas diri yang data digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak-hak sesorang sebagai penduduk Warga Negara Indonesia.



2. Sebagai akses layanan dasar , misalnya dalam laporan komisi pemberdayaan hukum untuk masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dengan adanya KTP masyarakat miskin mempunyai peluang untuk mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan pemerintah, antara lain BLT, Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), dan Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa diakses dengan syarat harus memiliki KTP.

Untuk mempertahankan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi akan fungsi dan kegunaaan KTP.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik ini adalah sebanyak 1 (satu)program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu: **Program Program Penataan Administrasi Kependudukan** dengan 1 kegiatan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur.

Analisis pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur	Predikat AKIP	Predikat /Nilai	60-70	51,06	72,94
	Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	65	60	92,31
Rata – rata capaian kinerja					82,625

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang mencapai target Kinerjadan satu indikator yang tidak mencapai target kinerja. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 96,155 persen.Namun begitu kategori capaiannya **Baik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 75 % sd.100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Predikat AKIP	C/	CC/50,00	CC/51,06
2.	Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparatur	92,31	92,31	92,31

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur ini mengalami peningkatan,sekalipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Indikator Predikat AKIPyang merupakan hasil peniliaian resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengalami peningkatan nilai namun tetap dengan predikat CCdari target di tahun 2018 yakni predikat B dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni 2016 yang hanya mampu meraih predikat C . untuk indikator Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparaturcapaian kinerjanya berada pada rentang capaian 75 persen – 100 persen yakni sebesar 92,31 persen pada tahun 2016sampai tahun 2018.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Predikat AKIP	Predikat /Nilai	CC/...	B	CC
2.	Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	60	65	91,66

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten

Luwu, maka terdapat 2 indikator yang belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Predikat AKIP; 2) Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparatur.



Indikator Predikat AKIP terealisasi dengan Predikat Kategori CC dari target CC pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yakni predikat kategori C, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena :

1. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya dan ;
2. Mereview IKU dan memperbaiki kualitas penyusunan LAKIP.

Untuk meningkatkan Kategori SAKIP indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah adanya pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.



Untuk Indikator Persentase TingkatPengembangan Kompetensi SDM Aparaturcapaian tahun laluhingga tahun 2018 tidak mengalamiperkembangan, dimana capaiannya tetap sebesar 92,31 persen.hal ini disebabkan karena :

1. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masih relatif rendah,
2. Suasana kerja yang kurang menyenangkan atau adanya kejenuhan karena terlalu lama bekerja pada suatu tempat,
3. Adanya tuntutan organisasi terhadap perubahan dan
4. Adanya perkembangan zaman yang sangat pesat.

Untuk mempertahankan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, dimana hasilnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur ini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu: Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 kegiatan, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 1 kegiatan.

Capaian Kinerja MISI.2

Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 Sasaran yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	%	80	60	75
	Angka rata-rata lama sekolah (SD)	Th	8,05	7	86,95

	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	%	100	99,50	99,50
	Angka Partisipasi Murni(APM) - SD/Paket A - SMP/Paket B	 % %	 98,50 91,30	 97,51 83,07	 98,99 90,98
Rata – rata capaian kinerja					89,10

Dari 4(empat) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat empat indikator yang tidak mencapai target kinerja. sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 89,10persen, namun begitu kategori capaiannya **Baik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 75 % sd.100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	31,35	31,3	75
2.	Angka rata-rata lama sekolah SD	74,90	74,90	86,95
3.	Angka partisipasi Kasar (APK)	103,80	99,75	99,50
4.	Angka Partisipasi Murni(APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTS/Paket B	 98,25 95,00	 98,97 95,97	 98,99 90,98

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan ini mengalami peningkatan. Indikator Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A), mengalami peningkatanpada tahun ini dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 31,35di tahun 2016 dan 31,3 Tahun 2017 ; Indikator Angka rata-rata lama sekolah SDselama dua tahun berturut-turut nilai capaiannya tidak mengalami peningkatan berbeda dengan tahun ini indicator tersebut mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 75 persen di tahun 2018. Sedangkan Indikator Angka partisipasi Kasar (APK)mengalami penurunan selama tiga

tahun terakhir. Dan untuk indikator Angka Partisipasi Murni(APM) yakni SD/Paket A dan SMP/Paket Bmasing-masing mengalami peningkatan setiap tahunnya.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	%	37	80	46,25
2.	Angka rata-rata lama sekolah SD	Th	6,33	8,05	78,63
3.	Angka partisipasi Kasar (APK)	%	99,27	100	99,27
4.	Angka Partisipasi Murni(APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTS/Paket B	%	 96,17 91,67	 98,50 91,30	 97,63 100,40

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 3 indikator yang belum mencapai target jangka menengah dan terdapat 1 indikator yang mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A); 2) Angka rata-rata lama sekolah; 3) Angka partisipasi Kasar (APK); 4) Angka Partisipasi Murni(APM) yakni SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B

Pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan, hanya Indikator Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik yang capain kinerjanya tidak mengalami perkembangan . Hal ini disebabkan



karena Kualitas infrastruktur. Dari dulu hingga sekarang masalah infrastruktur pendidikan masih menjadi hantu bagi pendidikan di Indonesia khususnya Kab.Luwu.hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan gedung sekolah ataupun Ruang kelas, dan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak juga hanya dilakukan secara sporadis sehingga Untuk meningkatkan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur gedung sekolah/ruang kelas secara merata di setiap wilayah di Kab.Luwu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan ini adalah sebanyak 1 (satu)program dan 30 kegiatan, yaitu: Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan 30 kegiatan.

Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau

Analisis pencapaian Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75	72	96,00
	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	%	100	100	100
Rata – rata capaian kinerja					98,00

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat 1 indikator yang mencapai target kinerja dan 1 indikator tidak mencapai target kinerja,sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau** belum berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 98,00 persen, namun begitu kategori capaiannya **Baik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 75 % sd.100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	100,10	94,38	96,00
2.	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau** ini mengalami peningkatan flutuaktif dan tetap setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan Indikator **Angka Usia Harapan Hidup**yang mengalami peningkatanflutuaktif setiap tahun.sedangkan untuk indikator**Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani** mengalami peningkatan tetap selama tiga tahun terakhir.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	%	73,54	75	98,05
2.	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat satu indikator yang belum mencapai target jangka menengah dan satu indikator mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Angka Usia Harapan Hidup (AHH); 2) Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani.

Indikator Angka Usia Harapan Hidup (AHH) terealisasi sebesar 72 tahun dari target 75 Tahun atau sebesar 96 persen,maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni :



1. Kualitas lingkungan
2. Kualitas prilaku/pola hidup
3. Kualitas pelayanan kesehatan

Sehingga upaya yang di lakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan indikator tersebut melalui peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, prilaku/pola hidu dan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lansia, pencegahan terhadap penyakit, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung lansia.

Indikator **Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani**terjadipeningkatancapaian yang tetap setiap tahunnya sebesar 100 persen.Pemerintah daerah dalam mengentaskan kasus balita gizi buruk setiap tahunnya menggelontorkan sejumlah anggaran sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.selain itu oleh pemerintah ada hal yang lebih penting selain melalui penggelontoran anggaran yang seharusnya sejak dini dilakukan, yakni sosialisasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Balita Gizi Buruk dan bagaimana penanganannya:



1. Faktor penyebab langsung; dimana Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang hingga berakibat gizi buruk
2. Faktor tidak langsung; 1)**Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai,**dimanaSetiap keluarga diaharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya. Namun kadang-kadang kebijaksanaan politik maupun ekonomi yang memberatkan rakyat akan menyebabkan hal ini.2)**Pola pengasuhan anak kurang memadai.** Setiap keluarga dan masyarakat

diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang dengan baik, baik fisik, mental, dan sosial. Suatu studi mempelajari mengapa dari sekian banyak bayi dan anak balita di suatu desa miskin hanya sebagian kecil yang gizi buruk, padahal orang tua mereka semuanya berprofesi sebagi petani. Dari studi ini diketahui pola pengasuhan anak berpengaruh terhadap timbulnya gizi buruk. Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, mengerti akan pentingnya ASI, Posyandu, kebersihan, anaknya akan lebih sehat.3)**Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai.** Sistem pelayanan kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. Pelayan kesehatan yang dimaksud yaitu imunisasi, penanganan diare dengan oralit, tindakan cepat pada anak balita yang tidak naik berat badan, pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi, dukungan pelayanan di Posyandu, Penyediaan Air Bersih, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

Sehingga upaya yang di lakukan pemerintah untuk menangani indikator tersebut adalah melalui upaya-upaya peningkatan pengadaan pangan, penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan, peningkatan status sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta peningkatan teknologi hasil pertanian dan teknologi pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau ini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 11 kegiatan, yaitu: program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan 11 Kegiatan.

Capaian Kinerja MISI. 3

Membangun Desa Menata Kota

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : **Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan.**

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	27,75	27,13	97,76
	Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	30	30	100
	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	%	12	36,33	302,75
	Persentase Traffic Light yang berfungsi baik	%	100	100	100
Rata – rata capaian kinerja					150,13

Dari 4(empat) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat empat indicator yang mampu mencapai target kinerja bahkan melebihi. dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaantelah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 150,13persen yang berarti kategori capaiannya **SangatBaik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	81,10	86,83	97,76
2.	Jumlah Pembangunan Jembatan	100	100	100
3.	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	212,25	261,75	302,75

4.	Persentase Traffic Light yang berfungsi baik	100	85,71	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan ini mengalami peningkatan. Indikator Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baiksekalipun mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut namun belum mampu mencapai target. untuk indikator Jumlah Pembangunan Jembatanselama tiga tahun berturut turut mampu mencapai target yang ada. Begitupun halnya dengan Indikator Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi. Sedang indikator Persentase Traffic Light yang berfungsi baik mencapai targetnya hanya di tahun 2016 dan 2018 sebesar 100 persen dan di tahun 2017 hanya 85,71 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	22,36	27,75	80,57
2.	Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	26	30	86,67
3.	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	%	31,96	12	266,33
4.	Persentase Traffic Light yang berfungsi baik	%	95,23	100	95,23

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 3 indikator yang belum mencapai target jangka menengah dan 1 indikator yang telah mencapai melebihi taget jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terwujudnya Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik; 2) Jumlah Pembangunan Jembatan; 3) Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi; Persentase Traffic Light yang berfungsi baik

4)



Indikator Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik terealisasi dengan persentase sebesar 27,13 persen dari target 27,75 persen maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya tidak mencapai terget. Hal ini disebabkan karena :

1. Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik hal ini bisa dikarenakan bahan yang dipergunakan tidak baik atau diluar ketentuan teknis. Hal ini yang sering kali menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan lebih cepat.
2. Kurangnya pengawasan disaat pengerjakan proyek tersebut, yang berakibat apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Air yang mengalir dibadan jalan/tidak ada saluran, karena menurut pengalaman, jalan yang sistem pembuangan airnya buruk akan semakin cepat rusak jalan tersebut. Bisa juga karena air yang menggenang di jalan.
4. Perencanaan yang kurang tepat, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sehingga untuk meningkatkan indikator tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menangani permasalahan tersebut, bahwa pembangunan jalan aspal yang baik harus dimulai pada proses perencanaan,pembangunan sampai dengan pemeliharaan agar tercipta jalan dengan kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula.



Indikator **Jumlah Pembangunan Jembatan**terjadipeningkatancapaian setiap tahunnya. Oleh pemerintah hal ini disebabkan karenajembatan tidak hanya dipandang sebagai alat penghubung antara tempat satu dengan tempat yang lain, melainkan sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan manusia,

serta membantu berkembangnya suatu daerah yang selama ini sulit di akses.dan yang paling utama jembatan sebagai salah satu prasarana transportasi selain jalan raya merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budayadanHANKAM.



Indikator **Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi**terjadipeningkatancapaian setiap tahunnya,hal ini terlihat dari capaian tiga tahun terakhir yang tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam membangun Irigasi menjadi komponen yang sangat urgen dalam peningkatan hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani,namun juga menjadi kepentingan pemerintah.

Indikator **Persentase Traffic Light yang berfungsi baik**terjadipeningkatancapaian dari tahun sebelumnya yakni 2017 .hal ini terjadi karena pengelolaan Traffic Light yang baik. Setiap ada kerusakan Lampu merah, Petugas dari Dishub tanggap dalam penanganannya atau upaya tindakan Lebih cepat lebih baik.untuk lebih meningkatkan indikator tersebut leading Sektor dari indikator ini melakukan pengelolaan traffic Light dengan menggunakan lampu lalu lintas tenaga surya.



e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan adalah sebanyak 4 (empat)program dan 24 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas, Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan,Program pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan 24 kegiatan

Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas.

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	82	81,53	99,42
	Persentase RT bersanitasi	%	86	85	98,83
	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	%	80	85,83	107,2
					101,81
Rata – rata capaian kinerja					101,77

Dari 3(tiga) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang mencapai melebihi target kinerja dan dua indikator yang tidak mencapai target kinerja. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas**telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 101,81 persen, sehingga kategori capaiannya **SangatBaik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Persentase Rumah Tangga	109,39	99,36	99,42

	Pengguna Air Bersih			
2.	Persentase RT bersanitasi	52,60	98,76	98,83
3.	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	94,02	107,2	107,2

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas**ini mengalami peningkatan yang flutuaktif. Indikator **Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih** mengalami peningkatan yang sifatnya flutuaktif atau naik turun.dimana109,39 persen di tahun 2016turun menjadi 99,36persen di tahun 2017 dan meningkat kembali 99,42 persen di tahun 2018. untuk indikator **Persentase RT bersanitasi**52,60 persen pada tahun 2016menjadi 98,76 tahun 2017 dan meningkat sedikit sebesar 98,83 persen pada tahun 2018.sedangkan untuk indikator **Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA**selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan 94,02 persen tahun 2016 menjadi 107,2 tahun 2017 dan 107,02 persen tahun 2018.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		83,65	82	102,01
2.	Persentase RT bersanitasi		72	86	83,72
3.	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA		78,12	80	97,65

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat dua indikator yang belum mencapai target jangka menengah dan satu indikator yang telah mencapai melampaui target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; 2) Persentase RT bersanitasi; 3) Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA.



Indikator **Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih** terealisasi dengan persentase sebesar 81,53 persen dari target 82 persen di tahun 2018, mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya yakni 2017 dan 2016. hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya air yang baikdimana telah meratanya penyebaran air, sehingga kita sudahtidak lagi mengalami kelangkaan air bersih. Untuk mempertahankan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya tetap menjadi yang terdepan dalam prioritasuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan



Indikator **Persentase RT bersanitasi**terealisasi sebesar 85 persen di tahun 2018 bila di bandingkan tahun sebelumnya yang 80 persen tahun 2017. Indikator ini selama tiga tahun berturut turut mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena :

1. Sanitasi dianggap sebagai urusan yang sangat penting, sehingga tidak lagi termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain,
2. bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan airbersih, tidak lagi berjalan sendiri-sendiritanpa adanya koordinasi yangterpadu.
3. Pelaksanaan pembangunan sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif

untuk lebih meningkatkan indikator diatas agar setiap tahunnya mengalami peningkatan maka upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menyusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil

masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap danberkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.



Indikator **Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA**terealisasi sebesar 85,84 persen di tahun 2018 meningkat bila di bandingkan 2 tahun sebelumnya yakni 52,60 persen tahun 2016. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan persampahan di TPA
2. Meningkatnya koordinasi intemal dan eksternal antar SKPD,sekertaris/bidang/seksi dalam menata perencanaan dan pengembangan kebijakan kelembagaan, peraturan danperundangan
3. Meningkatkan kewajiban masyarakat membayar retribusi sampah secara kontinyu dan
4. Meningkatkan peran masyarakat melakukan pemilahan sampah

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitasini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan 6 kegiatan.

Capaian Kinerja MISI.5

Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 4 Sasaran yang terdiri dari 8 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari

sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian.

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian	Jumlah Produktivitas padi per hektar	Ton/Hektar	7,53	7,89	104,7
	Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	51,70	55,12	106,61
Rata – rata capaian kinerja					105,65

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat dua indikator yang mencapai melebihi target kinerja dan satu indikator yang mencapai melebihi target kinerja dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian**berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 105,19 persen.Sehingga kategori capaiannya **Baik Sekali** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Jumlah Produktivitas padi per hektar	65,73	75,31	104,7
2.	Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	105,73	106,46	106,61

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanianini mengalami peningkatan yang signifikan. Indikator Jumlah Produktivitas padi per hektar mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 75,31 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 104,7 persen pada tahun 2018, dan untuk indikator

Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB,105,73 persen pada tahun 2016 meningkat106,46 persen pada tahun 2017 dan 106,61 persen di Tahun 2018.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

	Indikator Kinerja	Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Jumlah Produktivitas padi per hektar	Ton/ Hektar	6,23	7,53	82,73
2.	Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	54,93	51,70	106,24

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah dan 1 indikator yang telah mencapai melebihi target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Produktivitas padi per hektar; dan 2) Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB.



Indikator Jumlah Produktivitas padi per hektar terealisasi sebesar 7,89 Ton/Hektardari target 7,537,53Ton/hektar pada tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2017 yang terealisasi hanya sebesar 5,40 Ton/Hektardari target 7,17Ton/hektar.hal ini disebabkan karena Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia utamanya Kabupaten Luwu, dimana Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan penyimpangan iklim yang dapat menyebabkan

penurunan produktivitas.

Untuk meningkatkan capaian indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dalam mengoptimalkan sumber daya lahan untuk tanaman padi adalah dengan mempelajari secara obyektif hubungan antara produksi padi di suatu wilayah dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi padi. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor fisik terhadap produktivitas, serta menentukan faktor fisik mana yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap produktivitas.



Indikator **Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB**juga terjadipeningkatancapaian sebesar 106,61 persen pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 106,46 persen saja.hal inidisebabkan karenabesarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi yang ada di kabupaten luwu terhadap PDRB.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanianini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 7 kegiatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri.

Analisis pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	12	10	83,33
	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	9	9	100

Rata – rata capaian kinerja	91,66

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang mencapai target kinerja dan satu indikator yang tidak mencapai target kinerja. dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri**belum berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 91,66 persen. Namun begitu kategori capaiannya **Baik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 75 % sd.100 %.**

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja (%)		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	80	70	83,33
2.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri**ini mengalami peningkatan yang flutuaktif. Indikator **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 83,33 persen, dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 70 persen pada tahun 2017dan tetap 80 persen tahun 2016, dan untuk indikator **Jumlah perda yang mendukung iklim usaha**selama tiga tahun berturut turut tetap di posisi 100 persen.

c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDA /PMA	8	12	66,66
2.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	8	9	88,88

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten

Luwu, maka terdapat dua indikator yang belum mencapai target jangka.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA); dan 2) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.



Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) terealisasi sebanyak 10 PMDN/PMA dengan target 12PMDN/PMA sehingga persentase capaiannya sebesar 83,33 persen, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari dua tahun sebelumnya yakni masing masing sebesar 70 persen tahun 2017 dan 80 persen tahun 2016. Sehingga pemerintah pada tahun 2017 kemarin mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi penghambat indicator tersebut diatas seperti:

1. **Masalah dan hambatan birokrasi ;** rentang birokrasi di daerah yang terlalu panjang, ini telah mengakibatkan biaya yang mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan liar yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi
2. **Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah. ;** masalah pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan kegiatan investasi menjadi *unpredictable*.
3. **Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakaan ketenagakerjaan;** ingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah.
4. **Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak;** Dalam implementasinya di daerah, skema insentif yang diatur dalam berbagai aturan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kebijakan investasi yang di tetapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh investor.
5. **Rendahnya jaminan dan perlindungan investasi;** Meskipun UU Penanaman modal telah mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi dan

6. **Lemahnya koordinasi antar kelembagaan;** Ketidakjelasaan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi di daerah kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas. Kordinasi yang kurang terjadi oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok (politis) maupun ekonomi.

kemudianpemerintah daerah merangkum enam permasalahan diatas untuk menjadi program percepatan penanaman modal. Keenam permasalahan tersebut kemudian diselesaikan secara baik oleh pemerintah, guna meningkatkan arus masuk investor untuk berinvestasi di Kab.Luwu

Indikator **Jumlah perda yang mendukung iklim usaha**terjadipeningkatan tetap daricapaian tahun lalu.Mengapa demikian,pencapaian tersebut dianggap wajar dan memang menjadi perhatian utamanya pemerintah mengingat kemudahan berusaha menjadi pilar determinan pembangunan ekonomi di suatu daerah khususnya di daerah Kab.Luwu

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industriini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dengan 6 kegiatan

Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan.

Analisis pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	34.217	32.112	93,84
	Persentase Koperasi Aktif	%	9,09	49,17	540,09
Rata – rata capaian kinerja					317,38

b. Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang melebihi target kinerja dan satu indikator yang tidak mencapai target kinerja. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawantelah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 317,38 persen, sehingga kategori capaiannya **SangatBaik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 100 %**

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	3,09	2,64	93,84
2.	Persentase Koperasi Aktif	400,67	409,71	540,09

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan**ini mengalami peningkatandan penurunan secara bersamaan yang sifaynya signifikan. Indikator Jumlah Usaha Mikro dan Kecil mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni pada tahun 2017dan tahun 2016 yang masing-masing hanya sebesar 2,64 persen dan 3,09 persen.dan untuk indikator Persentase Koperasi Aktif540,09persen pada tahun 2018meningkat dari dua tahun sebelumnya yakni tahun 2017 sebesar 409,71 persen dan 400,67 persen di tahun 2016.

d. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	30.212	34.217	88,29
2.	Persentase Koperasi Aktif	%	47,31	9,09	520,46

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat dua indikator yang belum mencapai target jangka menengah

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil; dan 2) Persentase Koperasi Aktif.



Indikator Jumlah Usaha Mikro dan Kecil terealisasi dengan persentase sebesar 93,84 persen tahun 2018, tahun 2017 sebesar 2,64 persen dan tahun 2016 sebesar 3,09 persen. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan di tahun 2018 bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. hal ini disebabkan karena UKM di Kabupaten Luwu sudah mengalami peningkatan terutama dalam hal sumber daya manusia dan penguasaan teknologi

Sehingga untuk mempertahankan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah sungguh-sungguh menciptakan iklim yang tidak bias terhadap UKM dan membantu sepenuhnya UKM dalam menanggulangi berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh kelompok usaha kecil (UKM).

Sedangkan Indikator Persentase Koperasi Aktifterjadipeningkatancapaian dari 2tahun terakhir. hal ini disebabkan karenafungsi dan peran koperasi di Kab.Luwu :

1. **Partisipasi Anggota**; faktor ini sangat mendukung keberhasilan perkembangan suatu organisasi.melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan.



2. **Solidaritas antar anggota koperasi**; dengan ikatan ekonomi,ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih kongkrit.

3. **Perkembangan modal**; faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi karena dengan modal yang

cukup besar dapat mengembangkan usahanya yang lebih banyak lagi.

4. **Profesionalitas pengurus koperasi**; bahwa permasalahan korupsi yang terjadi di koperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan kepengurusan yang kuran professional.

Sehingga untuk mempertahankan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah : agar badan pengawas yang terbentuk lebih dalam mengawasi segala aktivitas dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan kepengurusan dan anggota,menyeleksi betul betul anggota dan pengurus yang akan bergabung dalam koperasi, memberikan pelatihan secara moral dan nyata tentang profesionalitas pengurus koperasi dan yang paling penting selalu menerapkan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawanini adalah sebanyak 3 (tiga)program dan 7 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan 2 kegiatan, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan 1 kegiatan dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan 4 kegiatan

Sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan.

Analisis pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	Ton	695.698	698.186	100,35
	Cakupan bina kelompok nelayan	Klp	26	50	192,31
Rata – rata capaian kinerja					146,33

Dari 2(dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat dua indikator yang mencapai melebihi target kinerja. dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan**telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 146,33 persen. sehingga kategori capaiannya **SangatBaik** karena

berada pada rentang capaian **Lebih dari 100 %**

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	104,05	97,73	100,35
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	192,31	192,31	192,31

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaanini mengalami peningkatan. Indikator **Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)** mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 97,73 persen pada tahun 2017meningkatsebesar100,35persen pada tahun 2018, dan untuk indikator **Cakupan bina kelompok nelayan**selama tiga tahun berturut turut tetap bertahan di 192,31 persen setiap tahunnya.

c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	Ton	664.853	663.206	100,24
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	Klp	50	26	192,30

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 2 indikator yang mencapai melebihi target jangka menengah.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya); dan 2) Cakupan bina kelompok nelayan.

Indikator Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan,hal ini disebabkan karena tingkatpemanfaatan



Sumberdayakelautandanperikanantelahoptimal,dan pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pengamanan sumber daya laut dan pesisir agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan.

Indikator **Cakupan bina kelompok nelayan**terjadi peningkatan tetap di tahun 2016 hingga tahun 2018 masing-masing sebesar 50 kelompok nelayan.hal ini disebabkan karenaKegiatan Kasus-kasus pemberdayaan yang biasa kita temui mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan kemandirian masyarakat.tidak dilakukan secara instan, berorientasi proyek, dimana upaya pemerintah daerah dimulai dengan memahami struktur masyarakat nelayan, tidak hanya melihat aspek ekonomi atau teknologi saja, melainkan juga aspek sosial budaya perlu diperhatikan, dimana penyuluhan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan berkonsentrasi kepada membentuk perubahan perilaku melalui berbagai prinsip pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat. Selain itu kegiatan penyuluhan sebagai implementasi komunikasi pembangunan adalah dengan membantu nelayan untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konseksuensi dari masing-masing



pilihan tersebut.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaanini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 11 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan 11 kegiatan.

Capaian Kinerja

MISI 1

Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : **Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana.**

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	94	84,8	90,21
Rata – rata capaian kinerja					90,21

Dari 1(satu) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang tidak mencapai target kinerja. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 90,21 persen. namun begitu kategori capaiannya **Baik** karena berada pada rentang capaian **Lebih dari 75 % sd.100 %.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	89,26	89,26	89,26

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran **Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana**ini mengalami peningkatan tetap setiap tahun. Indikator Persentase Ketaatan terhadap RTRWselama tiga tahun terakhir sebesar 89,26 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)
1.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	84,8	94	90,21

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat 1 indikator yang belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Ketaatan terhadap RTRW.

Indikator Persentase Ketaatan terhadap RTRW terealisasi dengan persentase capaian sebesar 90,21 persen dari target 94 persen tahun 2018, di tahun 2018RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031 yang telah berjalan selama tujuh tahun oleh pemerintah daerah dilakukan peninjauan kembali untuk dapat diketahui apakah Rencana Tata Ruang yang berlaku saat ini masih dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang.Dan hasil Peninjauan KembaliRTRW Kabupaten Luwu 2011-2031adalah bahwa RTRW Kabupaten Luwu masih dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang karena hasil penilaian Peninjauan Kembali bernilai 84,8 persen yang berarti masih diatas standar ketaatan terhadap RTRW.

Untuk indikator tersebut diatas yang dilakukan pemerintah daerah adalah RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031yang telah berjalan tujuh tahun telah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Luwu agar sedini mungkin dapat diketahui apakah Rencana Tata Ruang yang berlaku masih dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan, atau perlu diperbaiki. Apabila perlu diperbaiki, maka RTRW Kabupaten Luwu selanjutnya direvisi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencanaini adalah sebanyak 2 (dua)program dan 5 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan 5 kegiatan.

Capaian Kinerja

MISI.7

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum.

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	%	100	100	100
	Cakupan patroli petugas satpol PP	Kali	70	70	100
Rata – rata capaian kinerja					100

Dari 2 (dua) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat dua indikator yang mencapai target kinerja. dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukumtelah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		
		2016	**2017**	**2018**
1.	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	100	100	100
2.	Cakupan patroli petugas satpol PP	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukumini mengalami peningkatan tetap. Indikator **Persentase Kepatuhan terhadap Perda**dan **indikator Cakupan patroli petugas satpol PP**mengalami peningkatan tetap pada tahun ini sama seperti dua tahun sebelumnyayakni tahun 2017 dan tahun 2016,yaitu sebesar 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Target Jangka menengah	Capaian (%)

1.	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	%	100	100	100
2.	Cakupan patroli petugas satpol PP	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu, maka terdapat dua indikator yang telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Kepatuhan terhadap Perda; 2) Cakupan patroli petugas satpol PP.

Indikator Persentase Kepatuhan terhadap Perda terealisasi dengan persentase sebesar 100 persen dari target 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan tetap dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. **Komunikasi**; Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah.
2. **Sumber daya**; dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah
3. **Perilaku**; Diperlukan pula nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan.
4. **Struktur Birokratik**; Diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah.

Untuk mempertahankan indikator tersebut maka pemerintah daerah dalam melakukan formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi



Indikator Cakupan patroli petugas satpol PP juga terjadi peningkatan tetap selama 3 tahun terakhir yakni sebesar 100

persen. dimanakinerja pelayanan publik Polisi Pamong Praja sudah baik selama tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan antara lain adalah ; pertama, adanya sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, baiknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik, yang ditandai dengan tidak adanya tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.

Sehingga untuk mempertahankan indikator ini, dalam mengatasi masalah pelayanan publik sudah seharusnya menjadi program pemerintah yang harus secara terus menerus ditingkatkan pelaksanaannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukumini adalah sebanyak 2 (dua)program yaitu Program Satuan Tugas (Satgas) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan 1 kegiatan, dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 2 kegiatan.

Penggunaan biaya dalam mencapai sasaran strategis tahun 2018 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018, untuk mencapai 13 (tiga belas) sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 53.943.142.797,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.554.811.165,- atau 91,86 %.

Adapun analisis efisiensi terhadap anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

B.Realisasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan untuk mencapai terciptanyan kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud tersebut, diperlukan dukungan dana yang memadai, yang dikelola oleh sumber daya aparatur yang profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi dengan pengimplementasian sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa

konsekuensi logis semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengelolaan pemungutan PAD masuk ke dalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan tidak sebagaimana Dana Perimbangan yang lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, serta proses yang sederhana dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2018, Pendapatan PAD mencapai Rp. 98.578.091.182,16.

Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu TA. 2018 sebesar Rp. 1.271.248.467.435,39 yang terdiri atas:

1) Belanja Langsung Rp. 494.045.1183.339,39;
2) Belanja Tidak Langsungsebesar Rp. 777.203.349.096,00;

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	(%)
PENDAPATAN	1.340.510.284.241,00	1.267.828.678.209,16	94,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.956.013.141,00	98.578.091.182,16	89,65
Pendapatan Pajak Daerah	21.219.500.000,00	23.143.661.545,36	109,06
Pendapatan Retribusi Daerah	9.392.000.000,00	8.127.990.267,00	86,54
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.146.303.141,00	5.146.303.141,00	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.198.210.000,00	62.160.136.228,80	83,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	303.518.061.000,00	246.671.870.910,00	81,27
Pendapatan Hibah	53.144.000.000,00	4.711.492.400,00	8,86
BELANJA	1.369.283.198.366,09	1.271.248.467.435,39.	92,84
Belanja Pegawai	496.689.292.103,09	490.000.325.315,00	98,65
Belanja Barang	370.229.382.757,00	286.065.566.354,39	22,10

BELANJA MODAL	203.861.217.433,00		197.652.530.916,00	96,95
SURPLUS / (DEFISIT)	(28.772.914.125,09)		(3.419.789.226,23)	11,88
PENERIMAAN				
PEMBIAYAAN DAERAH	34.272.914.125,09		23.153.578.440,09	67,55
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	34.272.914.125,09		23.153.578.440,09	67,55
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000.000,00		5.500.000.000,00	100
Penyertaan Modal	4.500.000.000,00		4.500.000.000,00	100
PEMBIAYAAN NETTO	28.772.914.125,09		17.653.578.440,09	61,35
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00		47.430.359.851,09	100

BAB.4 PENUTUP

Kesimpulan

Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Luwu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 30 indikator sasaran, diketahui bahwa 6 indikator sasaran atau 153,73% **Sangat Baik**, dan 7 indikator sasaran atau 94,62% **Baik**. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 152,83 % atau bermakna Baik sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2018 adalah Baik sekali.

Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Dalampelaksanaan APBD TahunAnggaran 2018, permasalahan yang dihadapi secara umummeliputi :

1) Anggaran yang dibutuhkanuntukmelaksanakanprogram/kegiatan yang telahdirencanakanuntukmendukung dan mengakselerasipelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di KabupatenLuwurelatiflebih besar dibandingkandenganpotensi dan kemampuankeuangandaerah.
2) Kemampuan daya serap pada pelaksanaanbeberapaprogram dan kegiatan rata-rata belummencapai target yang telahditetapkansetiaptriwulan.
3) Peraturanperundang-undangan yang mengaturtentangpengelolaankeuangandaerahselalumengalamiperubahansehingg adapatmempengaruhipemahaman dan penerapanpengelolaankeuangandaerah.
4) Kemampuanaparatdalammengimplementasikanberbagairegulasi dan peraturanperundang-undangantentangmekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatifterbatas, sehinggaperludilakukanpeningkatansumber daya aparaturdalambentukpendidikan dan pelatihan.

b. Solusi

Terhadapidentifikasipermasalahan yang timbul,

makaalternatifsolusiterhadapkondisitersebut, adalahmenetapkanlangkah-langkahtaktis dan strategissebagaiberikut :

1) Perluperencanaan yang lebihmatang dan komprehensifuntukmenetapkanprogram dan kegiatanprioritas.
2) Koordinasiantarinstansiperluditingkatkandalammenetapkansasarankinerjamasing-masingunitkerja, sehinggatidakterjadilagiprogram/kegiatan yang sama pada unitkerja yang berbeda.
3) Perlupeningkatanupayaoptimalisasipengelolaansumber-sumberpendapatandaerah yang tidakbertentangandenganundang-undang agar dapatmeningkatkanjumlahpendapatandaerah.
4) Perlunyapeningkatankapasitas dan kapabilitaspersonildalambentukpendidikan dan pelatihan.
5) Perluterusdilakukansosialisasi dan bimbinganteknismengenaiperaturanperundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, belum terpenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milikAllah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Belopa, Februari2019

BUPATILUWU

H.A.MUDZAKKAR